



Laporan singkat Audiensi IGJ ke kantor DPP Partai Demokrat

Jakarta, 26 Mei 2021 – Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmi Hertanti melakukan audiensi ke kantor DPP Partai Demokrat yang berlokasi di Jalan Proklamasi No.41, RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam kesempatan ini, Direktur Eksekutif IGJ didampingi oleh Peneliti IGJ untuk isu globalisasi dan digitalisasi, Olisias Gultom; dan Peneliti IGJ untuk isu *trade and climate*, Parid Ridwanuddin.

Audiensi ini diterima langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didampingi oleh Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan sejumlah ketua badan serta Ketua Departemen DPP Partai Demokrat.

Di dalam kesempatan ini, Rahmi Hertanti menyampaikan sejumlah isu penting yang diadvokasi oleh IGJ, khususnya mengenai *free trade agreement* (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan berbagai negara di dunia. Diantara yang disebut adalah isu mengenai Indonesia – Europe Union (I-EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Menurut Rahmi, keterlibatan pemerintah Indonesia di dalam berbagai FTA seperti I-EU CEPA dan RCEP tidak lantas memperkuat perekonomian Indonesia. Sebaliknya, FTA justru memperlemah perekonomian Indonesia dan mempertaruhkan masa depan kehidupan rakyat di tingkat akar rumput sekaligus masa depan sumber daya alam Indonesia.

FTA juga, lanjut Rahmi, memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai peraturan perundangan yang dianggap tidak sesuai dengan hasil kesepakatan perjanjian perdagangan bebas.

Sementara itu, Olisias Gultom mempersoalkan lemahnya komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi data penduduk Indonesia dari berbagai kejahatan digital. Hal terbaru yang disinggunginya adalah kebocoran data pribadi 270 juta penduduk Indonesia yang baru beberapa pekan lalu terjadi. Berbagai kejahatan digital marak terjadi karena Pemerintah Indonesia tidak memiliki regulasi yang jelas.

Menurut Olisias Gultom, pembahasan dan perundingan bab E-commerce RCEP hanya akan merugikan Indonesia, akibat tidak adanya jaminan keamanan data khususnya data publik. Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini terus terjadi aktivitas pengumpulan data yang dilakukan oleh perusahaan besar tanpa adanya perlindungan dan kontrol dari otoritas negara. Hal ini sama dengan membuka ruang terjadinya “Kolonisasi Data” yang merugikan masyarakat Indonesia.

Adapun Parid Ridwanuddin menyampaikan sejumlah hal yang terkait dengan isu keadilan iklim, salah satunya mengenai arah pembangunan Indonesia yang belum

bisa keluar dari jeratan ekstraktivisme sumber daya alam, seperti ketergantungan kuat terhadap energi fosil, mendorong deforestasi, dan mendorong pertambangan nikel di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pola pembangunan semacam ini hanya akan memperburuk dampak krisis iklim dan membahayakan kehidupan masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang.

Berbagai praktik ekstraktivisme sumber daya alam di Indonesia terus terjadi karena Pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di dalam peta *global supply chain* perdagangan dunia. Namun yang terjadi sebaliknya, eksploitasi sumber daya alam yang menjadi ciri khas pembangunan Indonesia malah melanggengkan krisis sosial dan memperluas bencana ekologis seperti banjir dan longsor di berbagai tempat.

Secara umum, IGJ mendorong Partai Demokrat untuk menyuarakan isu *free trade agreement* (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas, deregulasi, dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat, serta masa depan sumber daya alam. IGJ juga mendorong partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini untuk tetap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat dan mengeksploitasi sumber daya alam.